



LAPORAN KEUANGAN AUDITED 2023

**STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN PALEMBANG**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kaidah-Kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada **Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang**. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Palembang, Januari 2024
Kepala,



Yoyok Fibrianto, SE,S.Pi,M.Pi
NIP. 19740225 200212 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| Kata Pengantar | 1 |
| Daftar Isi | 3 |
| Pernyataan Tanggung Jawab | 4 |
| Ringkasan | 5 |
| Laporan Realisasi Anggaran | 8 |
| Neraca | 9 |
| Laporan Operasional | 10 |
| Laporan Perubahan Ekuitas | 11 |
| Catatan atas Laporan Keuangan | 12 |
| Penjelasan Umum | 12 |
| Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran | 27 |
| Penjelasan atas Pos-Pos Neraca | 39 |
| Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional | 49 |
| Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas | 56 |
| Pengungkapan Penting Lainnya | 61 |
| Lampiran dan Daftar | 68 |



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALEMBANG**

JALAN GUBERNUR HAJI ASNAWI MANGKU ALAM KEL. KEBUN BUNGA,
KEC. SUKARAMI KOTA PALEMBANG KODE POS 30152
TELEPON (0811) 7120089, FAKSIMILE (0711) 385027
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bkjimpalembang@kkp.go.id

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan **Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang** yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang berakhir 31 Desember 2023 Sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palembang, Januari 2024
Kepala,

Yoyok Fibrianto, SE,S.Pi,M.Pi
NIP. 19740225 200212 1 001

Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2023 Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan pemerintah. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja dengan Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp142.190.000,00 atau mencapai 61 persen dari estimasi pendapatan sebesar 232.000.000,00. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp155.296.000,00 atau mencapai 34 persen dari estimasi pendapatan-LRA sebesar Rp46.040.000.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp7.475.647.698,00 atau mencapai 98 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp7.625.274.000,00. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.997.962,171,00 atau mencapai 99 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp7.040.798.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2023.

Nilai Aset Per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp11.730.375.714,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp49.537.472,00, Aset Tetap (neto) sebesar Rp11.680.838.242,00,

Piutang Jangka Panjang (neto) Rp. 0,00 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp16.243.769,00 dan Rp11.714.131.945,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan/LO, beban, Surplus/Defisit dari operasi, surplus atau defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus atau defisit/LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan – LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp138.639.000,00. Sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp7.696.863.523,00. sehingga terdapat defisit dari kegiatan operasional senilai Rp(7.558.224.523,00). Kegiatan non operasional dan pos-pos luar biasa masing-masing defisit sebesar Rp(41.003.622,00) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(7.599.228.145,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Ekuitas pada Tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp11.979.902.470,00 dikurangi defisit-LO sebesar Rp(7.599.228.145,00) dan ditambah transaksi antar entitas sebesar Rp7.333.457.620,00 kenaikan/penurunan ekuitas Rp(265.770.525,00) sehingga ekuitas akhir pada Tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp11.714.131.945,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal **31 Desember 2023**, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas sedangkan Neraca, laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

STASIUN KIPM PALEMBANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE TAHUNAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN
31 DESEMBER 2022

| URAIAN | CATATAN | TA 2023 | | % thd Anggaran | TA 2022 REALISASI |
|-------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | ANGGARAN | REALISASI | | |
| A. PENDAPATAN | | | | | |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | B.1. | 232,320,000 | 142,190,078 | 61.20 | 155,296,000 |
| Jumlah Pendapatan | | 232,320,000 | 142,190,078 | 61.20 | 155,296,000 |
| B. BELANJA | B.2. | | | | |
| Belanja Pegawai | B.3 | 4,133,668,000 | 4,120,485,461 | 99.68 | 4,063,981,580 |
| Belanja Barang | B.4 | 3,464,606,000 | 3,328,162,237 | 96.06 | 2,933,980,611 |
| Belanja Modal | B.5 | 27,000,000 | 27,000,000 | 100.00 | - |
| Belanja Bantuan Sosial | B.6 | - | - | - | - |
| JUMLAH BELANJA | | 7,625,274,000 | 7,475,647,698 | 98.04 | 6,997,962,191 |

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

STASIUN KIPM PALEMBANG

NERACA

Per 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

| URAIAN | CATATAN | 2023 | 2022 |
|--|---------|-----------------------|-----------------------|
| ASET | | | |
| ASET LANCAR | | | |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | C.1 | - | - |
| Kas di Bendahara Penerimaan | C.2 | - | - |
| Kas Lainnya dan Setara Kas | C.3 | - | - |
| Piutang Bukan Pajak | C.4 | - | - |
| Bagian Lancar TP/TGR | C.5 | - | - |
| Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran | C.6 | - | - |
| Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak | C.7 | - | - |
| Piutang Bukan Pajak (Netto) | C.8 | - | - |
| Belanja Dibayar di Muka | C.9 | - | - |
| Pendapatan yang Masih harus Diterima | C.10 | - | - |
| Persediaan | C.10 | 49,537,472 | 81,633,946 |
| Jumlah Aset Lancar | | 49,537,472 | 81,633,946 |
| PIUTANG JANGKA PANJANG | | | |
| Tagihan TP/TGR | C.11 | - | - |
| Tagihan Penjualan Angsuran | C.12 | - | - |
| Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panja | C.13 | - | - |
| Jumlah Piutang Jangka Panjang | | - | - |
| ASET TETAP | | | |
| Tanah | C.14 | 6,261,306,000 | 6,261,306,000 |
| Peralatan dan Mesin | C.15 | 5,506,901,033 | 5,867,289,558 |
| Gedung dan Bangunan | C.16 | 5,355,361,197 | 5,355,361,197 |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan | C.17 | 349,141,000 | 349,141,000 |
| Aset Tetap Lainnya | C.18 | 116,570,500 | 160,333,200 |
| Konstruksi dalam pengerjaan | C.19 | - | - |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | C.20 | (5,908,441,488) | (6,080,617,224) |
| Jumlah Aset Tetap | | 11,680,838,242 | 11,912,813,731 |
| ASET LAINNYA | | | |
| Aset Tidak Berwujud | C.21 | - | - |
| Aset Lain-Lain | C.22 | - | - |
| Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya | C.23 | - | - |
| Jumlah Aset Lainnya | | - | - |
| JUMLAH ASET | | 11,730,375,714 | 11,994,447,677 |
| KEWAJIBAN | | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | | |
| Uang Muka dari KPPN | C.24 | - | - |
| Utang kepada Pihak Ketiga | C.25 | 16,243,769 | 14,545,207 |
| Pendapatan Diterima di Muka | C.26 | - | - |
| Beban yang Masih Harus Dibayar | C.27 | - | - |
| Utang yang belum diragihkan | C.28 | - | - |
| Jumlah Kewajiban Jangka Pendek | | 16,243,769 | 14,545,207 |
| JUMLAH KEWAJIBAN | | 16,243,769 | 14,545,207 |
| EKUITAS | | | |
| Ekuitas | C.29 | 11,714,131,945 | 11,979,902,470 |
| JUMLAH EKUITAS | | 11,714,131,945 | 11,979,902,470 |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | | 11,730,375,714 | 11,994,447,677 |

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

STASIUN KIPM PALEMBANG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
DAN 31 DESEMBER 2022

| URAIAN | CATATAN | 2023 | 2022 |
|---|---------|------------------------|------------------------|
| KEGIATAN OPERASIONAL | | | |
| PENDAPATAN | | | |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | D.1 | 138,639,000 | 155,296,000 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | 138,639,000 | 155,296,000 |
| BEBAN | | | |
| Beban Pegawai | D.2 | 4,120,485,461 | 4,063,981,560 |
| Beban Persediaan | D.3 | 257,228,478 | 412,658,966 |
| Beban Barang dan Jasa | D.4 | 1,846,354,610 | 1,766,403,928 |
| Beban Pemeliharaan | D.5 | 557,183,126 | 537,610,401 |
| Beban Perjalanan Dinas | D.6 | 701,191,059 | 371,437,475 |
| Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat | D.7 | - | - |
| Beban Bantuan Sosial | D.8 | - | - |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | D.9 | 214,420,789 | 448,691,330 |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih | D.10 | - | - |
| JUMLAH BEBAN | | 7,696,863,523 | 7,600,783,660 |
| SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL | | (7,558,224,523) | (7,445,487,660) |
| KEGIATAN NON OPERASIONAL | | | |
| Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar | D.11 | (41,003,700) | |
| Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar | | 3,551,000 | - |
| Beban Pelepasan Aset Non Lancar | | 44,554,700 | - |
| Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | | 78 | (12,520,530) |
| Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | | 78 | - |
| Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | | - | 12,520,530 |
| Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | | - | - |
| Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional | | (41,003,622) | (12,520,530) |
| SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA | | (7,599,228,145) | (7,458,008,190) |
| POS LUAR BIASA | | | |
| Pendapatan PNBPN | D.12 | - | - |
| Beban Perjalanan Dinas | | - | - |
| Beban Persediaan | | - | - |
| SURPLUS/DEFISIT LO | | (7,599,228,145) | (7,458,008,190) |

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

STASIUN KIPM PALEMBANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
DAN 31 DESEMBER 2022

| URAIAN | CATATAN | 2023 | 2022 |
|---|---------|-----------------------|-----------------------|
| EKUITAS AWAL | E.1 | 11,979,902,470 | 12,595,244,489 |
| SURPLUS/DEFISIT LO | E.2 | (759,228,145) | (7,458,008,190) |
| KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS | E.3 | - | - |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR | E.3.1 | - | - |
| PENYESUAIAN NILAI ASET | E.3.2 | - | - |
| KOREKSI NILAI PERSEDIAAN | E.3.3 | - | - |
| KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI | E.3.4 | - | - |
| SELISIH REVALUASI ASET | | - | - |
| KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALU | E.3.5 | - | - |
| KOREKSI LAIN-LAIN | E.3.6 | - | - |
| TRANSAKSI ANTAR ENTITAS | | 733,457,620 | 6,842,666,171 |
| KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS | E.4 | (265,770,525) | (615,342,019) |
| EKUITAS AKHIR | E.5 | 11,714,131,945 | 11,979,902,470 |

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang

*Profil dan
Kebijakan
Teknis*

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga sesuai dengan PERMENKP 48 PERMENKP Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berkedudukan di Jalan Gubernur Haji Asnawi Mangku Alam Palembang, Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan fungsi utamanya melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke/di/keluar/ wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta penerapan sistem manajemen mutu. Melalui peran Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang diharapkan kualitas Laporan Keuangan dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang didirikan sebagai salah satu bagian integral dari Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan mempunyai peranan yang strategis dalam pengembangan

dan penyelamatan usaha perikanan di Indonesia, Upaya perlindungan sumberdaya ikan di Indonesia dari ancaman Hama Penyakit Ikan berbahaya di lakukan melalui kegiatan tindakan karantina ikan terhadap media pembawa hama penyakit ikan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran di seluruh Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan, dan perubahan organisasi yang termuat dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang berkomitmen dengan :

VISI:

“Hasil Perikanan yang Sehat Bermutu, Aman Konsumsi, dan Terpercaya”.

MISI :

“Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni :

1. Kedaulatan (*Sovereignty*), yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan

perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

2. Keberlanjutan (*Sustainability*), yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;
3. Kesejahteraan (*Prosperity*), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

TUJUAN :

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

Kedaulatan (*Sovereignty*), yakni :

1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
2. Mengembangkan sistem perkarantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.

Keberlanjutan (*Sustainability*), yakni :

1. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut ;
2. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya;
3. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan.

Kesejahteraan (*Prosperity*), yakni :

1. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat
2. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan.

SASARAN STRATEGIS :

1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan;
2. Meningkatnya ketersediaan produk Kelautan dan Perikanan;
3. Meningkatnya hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan;
4. Terselenggaranya modernisasi sistem produksi Kelautan dan Perikanan, pengolahan dan pemasaran produk Kelautan dan Perikanan yang optimal dan bermutu;
5. Terselenggaranya pengendalian, pengawasan terkait dengan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta penegakan hukum di bidang karantina ikan;
6. Tersedianya Sumber Daya Manusia Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang yang kompeten dan professional;
7. Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang;

8. Terwujudnya *good governance & clean government* di Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang;
9. Terkelolanya anggaran Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang secara optimal.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Stasiun KIPM Palembang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Stasiun KIPM Palembang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Stasiun KIPM Palembang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Stasiun KIPM Palembang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Stasiun KIPM Palembang adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

| Kualitas Piutang | Uraian | Penyisihan |
|------------------|--|------------|
| Lancar | Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo | 0.5% |
| Kurang Lancar | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan | 10% |
| Diragukan | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan | 50% |
| Macet | 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan | 100% |
| | 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN | |

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara

berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

| Kelompok Aset Tetap | Masa Manfaat |
|--|------------------|
| Peralatan dan Mesin | 2 s.d. 20 tahun |
| Gedung dan Bangunan | 10 s.d. 50 tahun |
| Jalan, Jaringan dan Irigasi | 5 s.d. 40 tahun |
| Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) | 4 tahun |

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

| Kelompok Aset Tak Berwujud | Masa Manfaat (tahun) |
|---|----------------------|
| <i>Software</i> Komputer | 4 |
| <i>Franchise</i> | 5 |
| Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. | 10 |
| Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim. | 20 |
| Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan | 25 |
| Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram. | 50 |
| Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I | 70 |

- Penyusutan Harta Berwujud Dan/Atau Amortisasi Harta Tak Berwujud dengan berpedoman Peraturan Menteri Keuangan No 7 tahun 2023.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban (6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Stasiun KIPM Palembang telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya *automatic adjustment* (blokir anggaran) sesuai dengan surat dari Kementerian Keuangan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja sebagai berikut:

| Jenis Belanja | JUMLAH ANGGARAN | |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| | ANGGARAN AWAL | ANGGARAN SETELAH BLOKIR |
| Pendapatan | | |
| Pendapatan Jasa Karantina | 240,000 | 240,000 |
| Pendapatan,Pengujian,Sertifikasi,K | 232,080,000 | 232,080,000 |
| Jumlah Pendapatan | 232,320,000 | 232,320,000 |
| Belanja | | |
| Belanja Pegawai | 4,082,490,000 | 4,133,668,000 |
| Belanja Barang | 3,483,306,000 | 3,464,606,000 |
| Belanja Bantuan Sosial | | |
| Belanja Modal | 27,000,000 | 27,000,000 |
| Jumlah Belanja | 7,592,796,000 | 7,625,274,000 |

Realisasi

B.1 Pendapatan

Pendapatan

Rp142.190.078,00

Realisasi Pendapatan untuk periode Semester II Tahun 2023 yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp142.190.078,00 atau mencapai 61 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp232.320.000,00. Realisasi Pendapatan Stasiun KIPM terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP Semester II Tahun 2023

| Jenis Pendapatan | 2023 | | % |
|--|--------------------|--------------------|--------------|
| | Estimasi (Rp) | Realisasi (Rp) | |
| Pendapatan Jasa Karantina Perikanan | 240,000 | 2,420,000 | 1,008.33 |
| Pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standardisasi | 232,080,000 | 136,219,000 | 58.69 |
| Pendapatan Denda | - | - | - |
| Penerimaan Kembali TAYL | - | 78 | - |
| Pendapatan dari Pengelolaan BMN | - | 3,551,000 | - |
| Jumlah | 232,320,000 | 142,190,078 | 61.20 |

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2022, terdapat penurunan realisasi Pendapatan Negara sebesar (Rp.13.105.922,00) atau 8.84persen. Penurunan Realisasi Pendapatan Stasiun KIPM Palembang karena adanya Permen KP No 35 tahun 2021 Tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai dengan Nol Rupiah atau Nol Persen Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perbandingan realisasi PNBP Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 disajikan pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2
Perbandingan Realisasi PNBPN TA. 2023 dan TA. 2022

| URAIAN JENIS PNBPN | REALISASI PNBPN (Rp) | | NAIK (TURUN) % | |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------|--------------|
| | Semester II TA. 2023 | Semester II TA. 2022 | Jumlah | % |
| Pendapatan Dari Pemanfaatan BMN | 3,551,000 | - | 3,551,000 | 100.00 |
| Pendapatan Pengembalian Belanja TAYL | 78 | - | 78 | 0.00 |
| Pendapatan Pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standardisasi | 136,219,000 | 153,331,000 | (17,112,000) | 100.00 |
| Pendapatan Denda | - | - | - | - |
| Pendapatan Jasa Karantina Perikanan | 2,420,000 | 1,965,000 | 455,000 | 23.16 |
| Jumlah | 142,190,078 | 155,296,000 | 455,000 | -8.44 |

B.2 Belanja Negara

Realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp7.475.647.698,00 atau 98 persen dari anggaran belanja sebesar Rp7.625.274.00,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per jenis belanja
Tahun 2023

| Uraian | Anggaran | Realisasi | % |
|-----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Belanja Pegawai | 4,133,668,000 | 4,120,485,461 | 99.68 |
| Belanja Barang | 3,464,606,000 | 3,328,162,237 | 96.06 |
| Belanja Modal | 27,000,000 | 27,000,000 | 100.00 |
| Jumlah | 7,625,274,000 | 7,475,647,698 | 98.04 |

Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun 2022, terdapat kenaikan realisasi belanja sebesar (6,83) persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Pagu tahun anggaran 2023 lebih besar dari pagu tahun anggaran 2022, dikarenakan tahun anggaran 2023 pagu untuk belanja pegawai lebih besar dibandingkan dengan pagu belanja pegawai di tahun 2022.
2. Pagu anggaran 2022 tidak terdapat pagu belanja modal.

Tabel 4
Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2023 dan Tahun 2022

| URAIAN | REALISASI NETTO (Rp) | | NAIK/ TURUN | |
|-----------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| | TA. 2023 | TA. 2022 | Jumlah (Rp) | % |
| Belanja Pegawai | 4,120,485,461 | 4,063,981,560 | 56,503,901 | 1.39 |
| Belanja Barang | 3,328,162,237 | 2,933,980,611 | 394,181,626 | 13.44 |
| Belanja Modal | 27,000,000 | - | 27,000,000 | #DIV/0! |
| Jumlah | 7,475,647,698 | 6,997,962,171 | 477,685,527 | 6.83 |

*Belanja
Pegawai
Rp4.120.485.461,
00*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 adalah sebesar Rp4.120.485.461,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja dan realisasi belanja Pegawai Tahun 2023 disajikan pada tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023

| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi Netto (Rp) | % |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| Belanja Gaji dan Tunjangan PNS | 2,057,660,000 | 2,046,610,978 | 99.46 |
| Belanja Lembur | 216,008,000 | 214,801,200 | 99.44 |
| Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito | 1,860,000,000 | 1,859,073,283 | 99.95 |
| Jumlah Belanja | 4,133,668,000 | 4,120,485,461 | 99.68 |

Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022, terdapat kenaikan realisasi belanja pegawai sebesar Rp56.503.901,00 atau (14,20) persen karena adanya pegawai pindah dan Kenaikan Grade Tunjangan Kinerja. Perbandingan realisasi belanja pegawai Tahun 2023 dan Tahun 2022 disajikan tabel 6 berikut ini:

Tabel 6
Perbandingan Belanja Pegawai Tahun 2023 dan Tahun 2022

| URAIAN | Realisasi Netto (Rp) | | NAIK (TURUN) | |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | TA.2023 | TA.2022 | Jumlah (Rp) | % |
| Belanja Gaji dan Tunjangan PNS | 2,046,610,978 | 2,104,575,940 | (57,964,962) | (2.75) |
| Belanja Lembur | 214,801,200 | 192,210,000 | 22,591,200 | 11.75 |
| Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito | 1,859,073,283 | 1,767,195,620 | 91,877,663 | 5.20 |
| Jumlah Belanja | 4,120,485,461 | 4,063,981,560 | 56,503,901 | 14.20 |

*Belanja
Barang
Rp3.328.162.237
00*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun 2023 adalah sebesar Rp3.328.162.237,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang Tahun 2023 disajikan pada tabel 7 berikut ini:

Tabel 7
Perbandingan Belanja Barang Tahun 2023

| URAIAN | Anggaran (Rp) | Realisasi Netto (Rp) | % |
|---|----------------------|-----------------------------|--------------|
| Belanja Barang Operasional | 1,044,787,753 | 858,104,900 | 82.13 |
| Belanja Barang Non Operasional | 347,297,800 | 294,586,050 | 84.82 |
| Belanja Jasa | 452,570,495 | 353,634,750 | 78.14 |
| Belanja Pemeliharaan | 556,954,126 | 552,509,227 | 99.20 |
| Belanja Perjalanan Dalam Negeri | 701,191,059 | 670,488,800 | 95.62 |
| Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi | 225,361,004 | 309,436,000 | 137.31 |
| Jumlah Belanja | 3,328,162,237 | 3,038,759,727 | 91.30 |

Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022, terdapat kenaikan sebesar Rp394.201.626 atau 13,34 persen karena pagu anggaran 2023 mengalami kenaikan dibanding pagu anggaran TA. 2022. Perbandingan realisasi Belanja Tahun 2023 dan Tahun 2022 disajikan pada tabel 8 berikut ini:

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahun 2023 dan Tahun 2022

| URAIAN | Realisasi Netto (Rp) | | Naik/ Turun | |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | TA. 2023 | TA. 2022 | Jumlah | % |
| Belanja Barang Operasional | 1,044,787,753 | 985,963,968 | 58,823,785 | 5.97 |
| Belanja Barang Non Operasional | 347,297,800 | 283,710,700 | 63,587,100 | 22.41 |
| Belanja Jasa | 452,570,495 | 483,103,510 | (30,533,015) | (6.32) |
| Belanja Pemeliharaan | 556,954,126 | 515,199,418 | 41,754,708 | 8.10 |
| Belanja Perjalanan Dalam Negeri | 701,191,059 | 371,437,475 | 329,753,584 | 88.78 |
| Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi | 225,361,004 | 294,545,540 | (69,184,536) | (23.49) |
| Jumlah Belanja | 3,328,162,237 | 2,933,960,611 | 394,201,626 | 13.44 |

Belanja Modal **B.5 Belanja Modal**

Rp27.000.000,00

Terdapat Realisasi Belanja Modal Tahunan Tahun 2023 sebesar Rp27.000.000,00 berupa : lemari dan meja.

Tabel 10
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2023

| URAIAN JENIS BELANJA | REALISASI | | Naik (Turun) | |
|------------------------------|-------------------|----------|-------------------|---------------|
| | 2023 | 2022 | Jumlah | % |
| Lemari | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | #DIV/0! |
| Meja | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | #DIV/0! |
| Jumlah Belanja Bersih | 27,000,000 | 0 | 27,000,000 | 100.00 |

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Realisasi belanja modal tanah tidak mengalami kenaikan/penurunan.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Intrakomptabel dan ekstrakomptabel Tahun 2023.

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tidak terdapat realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023. Sedangkan Tahun 2022 adalah sebesar Rp0,00. disajikan pada tabel 13 sebagai berikut:

Tabel 13
Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
Tahun 2023 dan Tahun 2022

| URAIAN JENIS BELANJA | REALISASI | | Naik/ Turun | |
|-------------------------|-----------|------|-------------|---------|
| | 2023 | 2022 | Jumlah | % |
| Gedung Tempat Kerja | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Belanja Modal BLU | 0 | 0 | 0 | - |
| Tugu/ Tanda Batas | 0 | 0 | 0 | - |
| Jumlah Belanja | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Tidak ada realisasi belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Tahun 2023.

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00.

*Belanja
Bantuan
Sosial Rp0,00*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Aset Lancar
Rp49.537.472,
00*

C.1 Aset Lancar

Nilai aset lancar per 31 Desember 2023 dan Tahun 2022 adalah masing – masing sebesar Rp49.537.472,00 dan Rp81.633.946,00 . Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian aset lancar per 31 Desember 2023 dan Tahun 2022 disajikan pada tabel 14 berikut ini:

Tabel 14
Rincian Aset Lancar Tahun 2023 dan Tahun 2022

| No | Aset Lancar | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 |
|---------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Kas di Bendahara Pengeluaran | - | - |
| 2 | Belanj dibayar dimuka(prepaid) | - | - |
| 3 | Penyisihan Piutang Tak Tertagih | - | - |
| 4 | Persediaan | 49,537,472 | 81,633,946 |
| 5 | Persediaan yang belum diregister | - | - |
| Jumlah | | 49,537,472 | 81,633,946 |

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0,00*

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran terdiri dari:

Tabel 15
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023

| No | Keterangan | 31 Des 2023 |
|---------------|--|-------------|
| 1 | Uang di Rekening Bank | - |
| 2 | Saldo UP (Uang tunai di brankas bendahara) | - |
| 3 | Kuitansi UP yang belum di-SPM-GU-kan | - |
| Jumlah | | - |

Kas di

C.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Bendahara Penerimaan Rp0,00 Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan per 31 September 2022 adalah sebesar masing-masing Rp0,00. Hal ini disebabkan oleh PNBP langsung disetorkan ke kas negara, jadi bendahara tidak menerima uang untuk disetorkan Kembali.

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0,00 **C.1.3 Kas Lainnya dan Setara Kas**
Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Piutang PNBP Rp0,00 **C.1.4 Piutang PNBP**
Saldo Piutang PNBP per 31 Desember 2023 dan per 30 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Bagian Lancar Tagihan **C.1.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

*TP/TGR
Rp0,00* Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 dan per 31
Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00.
Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum
diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh
tempo dalam 12 bulan atau kurang sejak tanggal
pelaporan.

*Bagian Lancar
TPA Rp0,00* **C.1.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**
Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)
per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-
masing adalah sebesar Rp0,00. Bagian Lancar TPA
merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam
waktu 12 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Bukan
Pajak Rp0,00* **C.1.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Bukan
Pajak**
Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per
31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah
sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

*Belanja
Dibayar di
Muka Rp0.00* **C.1.8 Belanja Dibayar di Muka**
Saldo Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2023 dan
per 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar
Rp0.00,-.Belanja dibayar di muka merupakan hak yang
masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai
akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh
namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0,00

C.1.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,00, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

Persediaan Rp 49.537.472,00

C.1.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp49.537.472,00 dan Rp81.633.946,00.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

| Jenis | 31Desember 2023 | 31 Desember 2022 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Barang Konsumsi | 49,537,472 | 80,920,946 |
| Barang untuk Pemeliharaan | - | 64,000 |
| Suku Cadang | - | 165,000 |
| Bahan Baku | - | 484,000 |
| Jumlah | 49,537,472 | 81,633,946 |

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

| | |
|--|---|
| <i>Tagihan TP/TGR Rp0.00</i> | <p>C.1.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)</p> <p>Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 sebesar Rp0.00.</p> |
| <i>Tagihan Penjualan Angsuran Rp0,00</i> | <p>C.1.12 Tagihan Penjualan Angsuran</p> <p>Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.</p> |
| <i>Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Rp0,00</i> | <p>C.1.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang</p> <p>Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.</p> |
| <i>Aset Tetap Rp11.680.838.242,00</i> | <p>C.2 Aset Tetap</p> <p>Nilai buku aset tetap per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing – masing sebesar Rp11.680.838.242,00 dan Rp11.912.813.731,00 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan untuk kegiatan operasional entitas.</p> |

Tanah

C.2.1 Tanah

Rp

6.261.306.000

,00

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Stasiun KIPM Palembang per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.6.261.306.000,00

Rincian Tanah Tahun 2023

| No | Luas | Lokasi | Nilai BMN | Hasil Penilaian |
|--------|--------|---|---------------|-----------------|
| 1 | 701 m2 | Jl. Mangku bumi Palembang | 320,000,000 | 1,706,892,000 |
| 2 | 847 m2 | Jl. Akses Bandara In't SMB II Palembang | 308,000,000 | 2,044,771,000 |
| 3 | 590m2 | Jl. Akses Bandara In't SMB II Palembang | 267,270,000 | 1,413,687,000 |
| 4 | 541m2 | Jl. Karantina Palembang | 190,432,000 | 1,095,956,000 |
| Jumlah | | | 1,085,702,000 | 6,261,306,000 |

Peralatan dan

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Mesin Rp

5.506.901.033

,00

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah Rp5.506.901.033,00 dan Rp5.867.289.558,00 . Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

| | |
|--|----------------------|
| Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2023 | 5,867,289,558 |
| Mutasi tambah: | |
| Pembelian | 41,871,000 |
| Transfer Masuk | 0 |
| Reklas Masuk | 0 |
| Mutasi kurang: | 0 |
| Transfer Keluar | 402,259,525 |
| Penghentian Penggunaan | - |
| Saldo per 31 Desember 2023 | 5,506,901,033 |
| Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023 | 0 |
| Nilai Buku per 30 Juni 2023 | 5,506,901,033 |

*Gedung dan
Bangunan
Rp5.355.361.197
,00*

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp5.335.361.197,00. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

| | |
|---|----------------------|
| Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2023 | 5,355,361,197 |
| Mutasi tambah: | |
| Pengembangan melalui KDP | - |
| Perolehan melalui KDP | - |
| Jaringan Listrik Gedung dan Bangunan | - |
| Revaluasi Gedung dan Bangunan | - |
| Saldo per 31 Desember 2023 | 5,355,361,197 |
| Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023 | - |
| Nilai Buku per 31 Desember 2023 | 5,355,361,197 |

*Jalan,Jaringan
dan Irigasi
Rp349.141.000,
00*

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp349.141.000,00. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

| | |
|---|--------------------|
| Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2023 | 349,141,000 |
| Mutasi tambah: | |
| - | - |
| Mutasi Kurang: | |
| - | - |
| Saldo per 31 Desember 2023 | 349,141,000 |
| Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023 | - |
| Nilai Buku per 31 Desember 2023 | 349,141,000 |

| | |
|---|---|
| <i>Aset Tetap Lainnya</i> <i>Rp116.570.500,00</i> | C.18 Aset Tetap Lainnya Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah Rp.116.570.500,00 dan Rp160.333.200,00. adanya mutasi berkurang sejumlah Rp.43.762.700,00 berupa buku perpustakaan pada Stasiun Karantina Ikan Pengendalian mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang. |
| <i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i> <i>Rp0,00</i> | C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. |
| <i>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</i> <i>Rp(5.908.441.488,00)</i> | C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp(5.908.441.488,00) dan Rp(6.080.617.224,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut: |

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

| No | Aset Tetap | Nilai Perolehan | Akumulasi Penyusutan | Nilai Buku |
|----------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|
| 1 | Peralatan dan Mesin | 5,506,901,003 | (4,939,753,061) | 567,147,942 |
| 2 | Gedung dan Bangunan | 5,355,361,197 | (755,258,932) | 4,600,102,265 |
| 3 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 349,141,000 | (213,429,495) | 135,711,505 |
| 4 | Aset Tetap yang tidak d gunakan | 0 | 0 | 0 |
| Akumulasi Penyusutan | | 11,211,403,200 | (5,908,441,488) | 5,302,961,712 |

*Aset Tak Berwujud
Rp0,00*

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah Rp0,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

*Aset Lain-Lain
Rp0,00*

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp0,00

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp0.00 dan Rp0.00,-. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Uang Muka dari KPPN Rp0,00

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp16.243.769,00

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp16.243.769,00 dan Rp14.545.207,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Utang kepada pihak ketiga ini berupa, beban

langganan listrik bulan desember 2023 sebesar Rp10.898.329,00, beban langganan air bulan desember 2023 sebesar Rp1.147.544,00 beban langganan telpon bulan desember 2023 sebesar Rp1.435.096,00 dan beban internet sebesar Rp.2.762.800,00 bulan desember 2023.

*Pendapatan
Diterima di
Muka
Rp0,00*

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar
Rp0,00*

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

*Ekuitas
Rp11.979.902.
470,00*

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp11.979.902.470,00 dan Rp12.595.244.489,00 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN

Surplus(Defisit) dari Kegiatan Operasional (Rp7.558.224.523,00)

OPERASIONAL

D.1 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional

Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Operasional pada 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing – masing sebesar minus (Rp7.558.224.523,00) dan (Rp7.445.487.660,00). Defisit tersebut merupakan selisih antara pendapatan sebesar Rp.138.639.000,00 dikurangi beban (Rp7.696.863.523,00)

Pendapatan PNBPNP Rp138.639.000,00

D.1.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp138.639.000,00 dan Rp155.296.000,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2023 dan Tahun 2022

| URAIAN | 31-Dec-23 | 31-Dec-22 | NAIK (TURUN) % |
|---|--------------------|--------------------|----------------|
| Pendapatan Jasa Karantina | 2,420,000 | 1,965,000 | 23.16 |
| Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi | 136,219,000 | 153,331,000 | 100.00 |
| Jumlah | 138,639,000 | 155,296,000 | (10.73) |

Pendapatan Jasa berasal dari pendapatan Pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standardisasi. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2022, terdapat penurunan realisasi Pendapatan Negara sebesar (Rp16.657.000,00) atau 10,73 persen. Penurunan Realisasi Pendapatan Stasiun KIPM Palembang karena adanya Permen KP No 35 tahun 2021 Tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara

Pengenaan Tarif Sampai dengan Nol Rupiah atau Nol Persen Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yg diberlakukan semenjak tanggal 20 September 2021. Target PNBPN sudah tersusun sejak penyusunan awal dari tahun 2019 s.d. tahun 2023 sehingga target PNBPN tidak bisa berkurang.

*Beban Pegawai
Rp4.120.485.461
,00*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.120.485.461,00 dan Rp4.063.981.560,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturasn perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2023 dan Tahun 2022

| URAIAN | 30 Desember 2023 | 30 Desember 2022 | NAIK (TURUN) % |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Beban Gaji tunjangan PNS | 2,045,552,523 | 2,104,575,940 | (2.80) |
| Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) | 1,859,215,438 | 1,767,195,620 | 5.21 |
| Beban Lembur | 215,717,500 | 192,210,000 | 12.23 |
| Jumlah | 4,120,485,461 | 4,063,981,560 | 1.39 |

*Beban Persediaan
Rp257.228.478,00*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp257.228.478,00 dan Rp412.658.966,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022

| URAIAN | Semester II TH 2023 | Semester II TH 2022 | NAIK (TURUN) % |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Beban Persediaan Konsumsi | 256,744,478 | 213,508,433 | 20.25 |
| Beban Persediaan Bahan Baku | 484,000 | 199,150,533 | (99.76) |
| Jumlah | 257,228,478 | 412,658,966 | (37.67) |

*Beban Barang dan Jasa Rp
1.848.354.610,00*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.848.354.610,00 dan Rp1.766.403.928,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan
Tahun 2022*

| Uraian | Semester II Tahun 2023 | Semester II Tahun 2022 | NAIK (TURUN) % |
|---|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| Beban Langganan Listrik | 154,527,181 | 131,021,255 | 17.94 |
| Beban Langganan Telepon | 25,264,091 | 24,350,941 | 3.75 |
| Beban Langganan Air | 35,019,985 | 29,465,360 | 18.85 |
| Beban Sewa | 67,000,000 | 102,764,704 | (34.80) |
| Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya | 0 | 31,000,000 | (100.00) |
| Beban Jasa Konsultan | 0 | 0 | 0.00 |
| Beban Jasa Profesi | 22,800,000 | 12,250,000 | 100.00 |
| Beban Jasa lainnya | 147,795,000 | 165,647,000 | (10.78) |
| Beban Bahan | 324,297,800 | 223,590,700 | 45.04 |
| Beban Honor Output Kegiatan | 8,160,000 | 8,160,000 | 0.00 |
| Beban Barang Non Operasional Lainnya | 13,340,000 | 51,960,000 | (74.33) |
| Beban Keperluan Perkantoran | 801,264,053 | 723,349,588 | 10.77 |
| Beban Penambah Daya Tahan Tubuh | 56,050,000 | 64,702,630 | (13.37) |
| Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Surat | 3,599,000 | 3,591,000 | 0.22 |
| Beban Honor Operasional Satker | 127,055,500 | 130,115,000 | (2.35) |
| Beban Barang Operasional Lainnya | 58,682,000 | 64,225,750 | (8.63) |
| Belanja Modal BLU | 0 | 0 | 0.00 |
| Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin | 1,500,000 | 0 | 0.00 |
| Beban Barang Operasional - Penanganan Covid | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 | 0 | 210,000 | (100.00) |
| Jumlah | 1,846,354,610 | 1,766,403,928 | 4.53 |

*Beban
Pemeliharaan Rp
557.183.126,00*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp557.183.126,00 dan Rp537.610.401,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan per 31 Desember 2023 dan

31 Desember Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan Tahun 2022

| URAIAN JENIS BEBAN | Semester II Tahun 2023 | Semester II Tahun 2022 | NAIK (TURUN) % |
|--|------------------------|------------------------|----------------|
| Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 241,594,172 | 243,476,720 | 0.00 |
| Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 315,359,954 | 271,722,698 | 16.06 |
| Beban persediaan untuk pemeliharaan | 0 | 791,150 | -100.00 |
| Beban persediaan suku cadang | 0 | 21,619,833 | -100.00 |
| Jumlah | 556,954,126 | 537,610,401 | 3.60 |

Beban Perjalanan Dinas Rp., 701.191.059, 00

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2022 dan Per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp701.191.059,00 dan Rp371.437.475,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Penurunan perjalanan dinas ini disebabkan oleh blokir anggaran. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan II Tahun 2022

| URAIAN JENIS BEBAN | Semester II Tahun 2023 | Semester II Tahun 2022 | NAIK (TURUN) % |
|---|------------------------|------------------------|----------------|
| Beban Perjalanan Biasa | 452,067,609 | 230,694,685 | 95.96 |
| Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota | 75,800,000 | 68,470,000 | 10.71 |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 95,700,000 | 0 | 100.00 |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 77,623,450 | 0 | #DIV/0! |
| Jumlah | 701,191,059 | 299,164,685 | 134.38 |

*Beban
Barang untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0,00*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Stasiun KIPM Palembang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2016.

*Beban
Bantuan
Sosial Rp0,00*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Penurunan beban bansos karena adanya penghematan alokasi anggaran.

*Beban
Penyusutan
dan
Amortisasi Rp
214.420.789,
00*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp214.420,789,00 dan Rp236.970.523,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Semester II Tahun 2023

dan Semester II Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan Tahun 2022 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan Tahun

| | URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI | TA. 2023 | TA. 2022 |
|------|---|-------------|-------------|
| | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 256,894,287 | 172,152,915 |
| | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 68,961,784 | 60,344,314 |
| | Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan | 2,936,000 | 4,473,294 |
| | Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah | - | - |
| | Jumlah Penyusutan | 328,792,071 | 236,970,523 |
| | Beban Amortisasi Software | - | - |
| | Beban Penyusutan aset lain-lain | - | - |
| | Jumlah Amortisasi | - | - |
| 2022 | Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi | 328,792,071 | 236,970,523 |

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0,00

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Defisit dari Kegiatan Non Operasional (Rp41.003.622,00)

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 sebesar (Rp.41,003.622,00) dan Tahun 2022 sebesar (Rp12.520.530,00)

Pos Luar Biasa Rp0,00 **D.12 Pos Luar Biasa**
Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

E.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp11.979.902.470,00 **E.1 Ekuitas Awal**
Nilai ekuitas awal per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp11.979.902.470,00 dan Rp12.595.244.489,00.

Defisit LO Rp(7.599.228.145,00) **E.2 Surplus (Defisit) LO**
Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp(7.599.228.145,00) dan Rp(7.458.008.190,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai Aset Rp0 **E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset**
Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada Tahun 2023 dan Tahun 2022 2022 adalah sebesar Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

| | |
|--|---|
| <i>Koreksi Atas Reklasifikasi Rp0.00</i> | E.3.2 Koreksi Atas Reklasifikasi Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. |
| <i>Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0.00</i> | E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. |
| <i>Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp0,00</i> | E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. |
| <i>Koreksi Lain-Lain Lain Rp0,00</i> | E.3.6 Koreksi Lain-Lain Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. |

Transaksi E.4 Transaksi Antar Entitas

Rp7.333.457.620,00

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp7.333.457.620,00 dan Rp6.842.666.171,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

| Transaksi Antar Entitas | Nilai |
|--|----------------------|
| Diterima dari Entitas Lain | (142,190,078) |
| Ditagihkan ke Entitas Lain | 7,475,647,698 |
| Transfer Masuk | - |
| Transfer Keluar | - |
| Pengesahan Hibah Langsung | - |
| Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung | - |
| Jumlah | 7,333,457,620 |

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/ Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar Rp(142.190.078,00) sedangkan DKEL sebesar Rp7.475.647.698,00.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 terdiri dari:

Detail transaksi Transfer Masuk dapat disajikan sebagai berikut :

| AKUN | URAIAN AKUN | Kuantitas | Nilai |
|--------|-------------------------------|-----------|-------|
| 117111 | Barang Konsumsi | - | - |
| 117121 | Pita Cukai, Materai dan Leges | - | - |
| Total | | | - |

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas.

Ekuitas Akhir

*Rp11.714.131.945
,00*

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas akhir per 31 Desember 2023 dan Nilai Ekuitas akhir per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp11.714.131.945,00 dan Rp11.979.902.470,00

F.PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian-kejadian penting yang menyebabkan perubahan setelah tanggal neraca di laporkan.

| No | No Rekening | Nama Rekening | Saldo Per 31 Desember 2023 |
|----|------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 1 | 8100125674811000 | BPG.014.Stasiun KIPM Palembang | 0 |

- o Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Stasiun KIPM Palembang Nomor : B.008/08.0/OT-220/I/2022 tanggal 03 Januari 2023 tentang Tim Pengelolaan Keuangan Tahun 2023 Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Stasiun KIPM Palembang, Pejabat Pengelola Keuangan adalah sebagai berikut :

| No | Nama | Jabatan |
|----|-------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Yoyok Fibrianto,SE,S.Pi, M.Pi | Kuasa Pengguna Anggaran |
| 2 | Yoyok Fibrianto,SE,S.Pi, M.Pi | Pejabat Pembuat Komitmen |
| 3 | Septiana Puspasari zuna, SH | Pejabat Penandatanganan SPM |
| 4 | Bambang Lukito | Bendahara Pengeluaran |
| 5 | Engla Asri, SE,MM | Bendahara Penerimaan |

- o Pada tanggal 17 Februari 2023 Stasiun KIPM Palembang melakukan revisi yang pertama dengan nomor revisi : DIPA-032.13.2.567481/2023 Revisi Pertama. Alasan dilakukan revisi adalah Revisi Halaman III DIPA.

- Pada tanggal 14 April 2023 Stasiun KIPM Palembang melakukan revisi yang kedua dengan nomor revisi : DIPA-032.13.2.567481/2023 Revisi Kedua. Alasan dilakukan revisi adalah Revisi Halaman III DIPA.
- Pada tanggal 02 Juli 2023 Stasiun KIPM Palembang melakukan revisi yang ketiga dengan nomor revisi : DIPA-032.13.2.567481/2023 Revisi Ketiga Alasan dilakukan revisi adalah Revisi Halaman III DIPA.
- Pada tanggal 06 Juli 2023 Stasiun KIPM Palembang melakukan revisi yang keempat dengan nomor revisi : DIPA-032.13.2.567481/2023 Revisi Keempat. Alasan dilakukan revisi adalah Revisi Halaman III DIPA.
- Pada tanggal 19 Oktober 2023 Stasiun KIPM Palembang melakukan revisi yang kelima dengan nomor revisi : DIPA-032.13.2.567481/2023 Revisi Kelima. Alasan dilakukan revisi adalah Penambahan Gaji Pegawai dari Eselon I BKIPM.
- Pada tanggal 06 N0vember 2023 Stasiun KIPM Palembang melakukan revisi yang keenam dengan nomor revisi : DIPA-032.13.2.567481/2023 Revisi Keenam Alasan dilakukan revisi adalah Revisi Pergeseran akun dari akun 522111 (belanja langganan daya dan jasa) ke akun 511111 (belanja gaji pokok)
- Pada tanggal 16 November 2023 Stasiun KIPM Palembang melakukan revisi yang ketujuh dengan nomor revisi : DIPA-032.13.2.567481/2023 Revisi Ketujuh Alasan dilakukan revisi adalah Revisi Kekurangan Gaji diambil dari akun 511129 (Belanja Uang Makan PNS) ke akun 511111 (Belanja Gaji Pokok PNS)

- Pada tanggal 29 November 2023 Stasiun KIPM Palembang melakukan revisi yang kedelapan dengan nomor revisi : DIPA-032.13.2.567481/2023 Revisi Kedelapan Alasan dilakukan revisi adalah Revisi penambahan akun belanja jasa lainnya DIPA. Dari Akun 521111 (Belanja Keperluan Perkantoran) ke akun 522191 (Belanja Jasa Lainnya)

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN 13
SATUAN KERJA : STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALEMBANG 567481

Tgl Data : 13/05/24 6:25 AM
Tgl Cetak : 13/05/24 11:02 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new

| URAIAN | 2023 | | | | 2022 | | | |
|---|----------------------|----------------------|------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|------------------------------------|-----------|
| | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN | % | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN | % |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| a. Dana Perimbangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Dana Transfer Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Dana Bagi Hasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Dana Alokasi Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Dana Transfer Khusus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Dana Alokasi Khusus Fisik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Dana Insentif Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Dana Keistimewaan DIY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Dana Otonomi Khusus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Dana Desa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Hibah Kepada Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II) | 7,625,274,000 | 7,475,647,698 | (149,626,302) | 98 | 7,040,798,000 | 6,997,962,171 | (42,835,829) | 99 |
| C. PEMBIAYAAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Keterangan :

FINAL

Palembang, 13 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



YOYOK FIBRIANTO, SE.S.Pt.M.PI
197402252002121001

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN

SATUAN KERJA : (567481) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALEMBANG

Tgl Data : 13/05/24 6:25 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 11:00 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker

| URAIAN | 2023 | 2022 | KENAIKAN/ PENURUNAN | (%) |
|---|---------------|---------------|------------------------|----------|
| KEGIATAN OPERASIONAL | 0 | 0 | 0 | |
| PENDAPATAN OPERASIONAL | 0 | 0 | 0 | |
| PENDAPATAN PERPAJAKAN | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Pajak Penghasilan | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Cukai | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Pajak Lainnya | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Bea Masuk | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Bea Keluar | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah Pendapatan Perpajakan | 0 | 0 | 0 | |
| PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Sumber Daya Alam | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya | 138,639,000 | 155,296,000 | (16,657,000) | (10.726) |
| Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak | 138,639,000 | 155,296,000 | (16,657,000) | (10.726) |
| PENDAPATAN HIBAH | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Hibah | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah Pendapatan Hibah | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah Pendapatan | 138,639,000 | 155,296,000 | (16,657,000) | (10.726) |
| BEBAN OPERASIONAL | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Pegawai | 4,120,485,461 | 4,063,981,560 | 56,503,901 | 1.39 |
| Beban Persediaan | 257,228,478 | 412,658,966 | (155,430,488) | (37.666) |
| Beban Barang dan Jasa | 1,846,354,610 | 1,766,403,928 | 79,950,682 | 4.526 |
| Beban Pemeliharaan | 557,183,126 | 537,610,401 | 19,572,725 | 3.641 |
| Beban Perjalanan Dinas | 701,191,059 | 371,437,475 | 329,753,584 | 88.778 |
| Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Bunga | 0 | 0 | 0 | |

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN

SATUAN KERJA : (567481) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALEMBANG

Tgl Data : 13/05/24 6:25 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 11:00 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker

| URAIAN | 2023 | 2022 | KENAIKAN/ PENURUNAN | (%) |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| Beban Subsidi | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Hibah | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Bantuan Sosial | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | 390,330,305 | 448,691,330 | (58,361,025) | (13.007) |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Transfer | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Lain-Lain | 0 | 0 | 0 | |
| JUMLAH BEBAN | 7,872,773,039 | 7,600,783,660 | 271,989,379 | 3.578 |
| SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL | (7,734,134,039) | (7,445,487,660) | (288,646,379) | 3.877 |
| KEGIATAN NON OPERASIONAL | 0 | 0 | 0 | |
| Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar | (41,003,700) | 0 | (41,003,700) | () |
| Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar | 3,551,000 | 0 | 3,551,000 | |
| Beban Pelepasan Aset Non Lancar | 44,554,700 | 0 | 44,554,700 | |
| Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | 0 | 0 | 0 | |
| Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | 78 | (12,520,530) | 12,520,608 | (100.00 1) |
| Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | 78 | 0 | 78 | |
| Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | 0 | 12,520,530 | (12,520,530) | (100) |
| JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL | (41,003,622) | (12,520,530) | (28,483,092) | 227.491 |
| SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA | (7,775,137,661) | (7,458,008,190) | (317,129,471) | 4.252 |
| POS LUAR BIASA | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Luar Biasa | 0 | 0 | 0 | |
| POS LUAR BIASA | 0 | 0 | 0 | |
| SURPLUS/DEFISIT - LO | (7,775,137,661) | (7,458,008,190) | (317,129,471) | 4.252 |

Keterangan :

FINAL

Palembang, 13 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



[Handwritten Signature]
YOYOK FIBRIANTO, SE.S.PI.M.PI
197402252002121001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN

SATUAN KERJA : (567481) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALEMBANG

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 11:02 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker

| URAIAN | 2023 | 2022 | KENAIKAN/ PENURUNAN | (%) |
|--|-----------------|-----------------|------------------------|-----|
| EKUITAS AWAL | 11,979,902,470 | 12,595,244,489 | (615,342,019) | - |
| SURPLUS/DEFISIT-LO | (7,775,137,661) | (7,458,008,190) | (317,129,471) | - |
| KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS | 0 | 0 | 0 | - |
| PENYESUAIAN NILAI ASET | 0 | 0 | 0 | - |
| KOREKSI NILAI PERSEDIAAN | 0 | 0 | 0 | - |
| SELISIH REVALUASI ASET | 0 | 0 | 0 | - |
| KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI | 0 | 0 | 0 | - |
| LAIN-LAIN | 0 | 0 | 0 | - |
| TRANSAKSI ANTAR ENTITAS | 7,333,457,620 | 6,842,666,171 | 490,791,449 | - |
| KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS | (441,680,041) | (615,342,019) | 173,661,978 | - |
| EKUITAS AKHIR | 11,538,222,429 | 11,979,902,470 | (441,680,041) | - |

Keterangan :

FINAL

Palembang, 13 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



YOYOK FIBRIANTO, SE.S.PI.M.PI
197402252002121001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN

SATUAN KERJA : (567481) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALEMBANG

Tgl Data : 13/05/24 6:25 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 11:06 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

| KODE TRN | KODE AKUN | NAMA AKUN | DEBET | KREDIT |
|----------|-----------|---|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0.0 | 117111 | Barang Konsumsi | 49,537,472 | 0 |
| 0.0 | 131111 | Tanah | 6,261,306,000 | 0 |
| 0.0 | 132111 | Peralatan dan Mesin | 5,506,901,033 | 0 |
| 0.0 | 133111 | Gedung dan Bangunan | 5,355,361,197 | 0 |
| 0.0 | 134111 | Jalan dan Jembatan | 75,483,000 | 0 |
| 0.0 | 134112 | Irigasi | 52,353,000 | 0 |
| 0.0 | 134113 | Jaringan | 221,305,000 | 0 |
| 0.0 | 135121 | Aset Tetap Lainnya | 116,570,500 | 0 |
| 0.0 | 137111 | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | 0 | 5,050,844,970 |
| 0.0 | 137211 | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | 0 | 815,603,246 |
| 0.0 | 137311 | Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan | 0 | 75,483,000 |
| 0.0 | 137312 | Akumulasi Penyusutan Irigasi | 0 | 14,044,079 |
| 0.0 | 137313 | Akumulasi Penyusutan Jaringan | 0 | 128,375,709 |
| 0.0 | 212112 | Beban barang yang masih harus dibayar | 0 | 16,243,769 |
| 0.0 | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain | 0 | 7,475,647,698 |
| 0.0 | 313121 | Diterima dari Entitas Lain | 142,190,078 | 0 |
| 0.0 | 391111 | Ekuitas | 0 | 11,979,902,470 |
| 3.0 | 425122 | Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin | 0 | 3,551,000 |
| 3.0 | 425289 | Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya | 0 | 136,219,000 |
| 3.0 | 425332 | Pendapatan Jasa Karantina Perikanan | 0 | 2,420,000 |
| 3.0 | 425911 | Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 | 78 |
| 3.0 | 511111 | Beban Gaji Pokok PNS | 1,432,467,300 | 0 |
| 3.0 | 511119 | Beban Pembulatan Gaji PNS | 20,721 | 0 |
| 3.0 | 511121 | Beban Tunj. Suami/Istri PNS | 106,325,270 | 0 |
| 3.0 | 511122 | Beban Tunj. Anak PNS | 37,162,684 | 0 |
| 3.0 | 511123 | Beban Tunj. Struktural PNS | 22,680,000 | 0 |
| 3.0 | 511124 | Beban Tunj. Fungsional PNS | 82,530,000 | 0 |
| 3.0 | 511125 | Beban Tunj. PPh PNS | 1,969,103 | 0 |
| 3.0 | 511126 | Beban Tunj. Beras PNS | 93,783,900 | 0 |
| 3.0 | 511129 | Beban Uang Makan PNS | 251,242,000 | 0 |
| 3.0 | 511151 | Beban Tunjangan Umum PNS | 18,430,000 | 0 |
| 3.0 | 512211 | Beban Uang Lembur | 214,801,200 | 0 |
| 3.0 | 512411 | Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) | 1,859,073,283 | 0 |
| 3.0 | 521111 | Beban Keperluan Perkantoran | 801,264,053 | 0 |
| 3.0 | 521113 | Beban Penambah Daya Tahan Tubuh | 56,050,000 | 0 |
| 3.0 | 521114 | Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat | 3,599,000 | 0 |
| 3.0 | 521115 | Beban Honor Operasional Satuan Kerja | 127,055,500 | 0 |
| 3.0 | 521119 | Beban Barang Operasional Lainnya | 58,682,000 | 0 |

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN

SATUAN KERJA : (567481) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALEMBANG

Tgl Data : 13/05/24 6:25 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 11:06 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

| KODE TRN | KODE AKUN | NAMA AKUN | DEBET | KREDIT |
|---------------|-----------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.0 | 521211 | Beban Bahan | 324,297,800 | 0 |
| 3.0 | 521213 | Beban Honor Output Kegiatan | 8,160,000 | 0 |
| 3.0 | 521219 | Beban Barang Non Operasional Lainnya | 13,340,000 | 0 |
| 3.0 | 521252 | Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel | 1,500,000 | 0 |
| 3.0 | 522111 | Beban Langganan Listrik | 154,527,181 | 0 |
| 3.0 | 522112 | Beban Langganan Telepon | 25,264,091 | 0 |
| 3.0 | 522113 | Beban Langganan Air | 35,019,985 | 0 |
| 3.0 | 522141 | Beban Sewa | 67,000,000 | 0 |
| 3.0 | 522151 | Beban Jasa Profesi | 22,800,000 | 0 |
| 3.0 | 522191 | Beban Jasa Lainnya | 147,795,000 | 0 |
| 3.0 | 523111 | Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 241,594,172 | 0 |
| 3.0 | 523121 | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 315,359,954 | 0 |
| 3.0 | 524111 | Beban Perjalanan Dinas Biasa | 452,067,609 | 0 |
| 3.0 | 524113 | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota | 75,800,000 | 0 |
| 3.0 | 524114 | Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 95,700,000 | 0 |
| 3.0 | 524119 | Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 77,623,450 | 0 |
| 3.0 | 591111 | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 260,299,090 | 0 |
| 3.0 | 591211 | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 120,688,628 | 0 |
| 3.0 | 591312 | Beban Penyusutan Irigasi | 2,160,628 | 0 |
| 3.0 | 591313 | Beban Penyusutan Jaringan | 6,785,959 | 0 |
| 3.0 | 592222 | Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah | 396,000 | 0 |
| 3.0 | 593111 | Beban Persediaan konsumsi | 256,744,478 | 0 |
| 3.0 | 593113 | Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan | 64,000 | 0 |
| 3.0 | 593114 | Beban Persediaan suku cadang | 165,000 | 0 |
| 3.0 | 593131 | Beban Persediaan bahan baku | 484,000 | 0 |
| 3.0 | 596111 | Kerugian Pelepasan Aset | 44,554,700 | 0 |
| JUMLAH | | | 25,698,335,019 | 25,698,335,019 |

Keterangan :

FINAL

Palembang, 13 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



YOYOK FIBRIANTO, SE, S.P.I.M.PI

197402252002121001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN

SATUAN KERJA : (567481) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALEMBANG

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 11:04 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

| NAMA PERKIRAAN | JUMLAH | | Kenaikan (Penurunan) | |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| | 2023 | 2022 | Jumlah | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ASET | | | | |
| ASET LANCAR | | | | |
| Persediaan | 49,537,472 | 81,633,946 | (32,096,474) | (39.32) |
| JUMLAH ASET LANCAR | 49,537,472 | 81,633,946 | (32,096,474) | (39.32) |
| ASET TETAP | | | | |
| Tanah | 6,261,306,000 | 6,261,306,000 | 0 | 0.00 |
| Peralatan dan Mesin | 5,506,901,033 | 5,867,289,558 | (360,388,525) | (6.14) |
| Gedung dan Bangunan | 5,355,361,197 | 5,355,361,197 | 0 | 0.00 |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | 349,141,000 | 349,141,000 | 0 | 0.00 |
| Aset Tetap Lainnya | 116,570,500 | 160,333,200 | (43,762,700) | (27.29) |
| AKUMULASI PENYUSUTAN | (6,084,351,004) | (6,080,617,224) | (3,733,780) | 0.06 |
| JUMLAH ASET TETAP | 11,504,928,726 | 11,912,813,731 | (407,885,005) | (3.42) |
| JUMLAH ASET | 11,554,466,198 | 11,994,447,677 | (439,981,479) | (3.67) |
| KEWAJIBAN | | | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | | | |
| Utang kepada Pihak Ketiga | 16,243,769 | 14,545,207 | 1,698,562 | 11.68 |
| JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 16,243,769 | 14,545,207 | 1,698,562 | 11.68 |
| JUMLAH KEWAJIBAN | 16,243,769 | 14,545,207 | 1,698,562 | 11.68 |
| EKUITAS | | | | |
| EKUITAS | | | | |
| Ekuitas | 11,538,222,429 | 11,979,902,470 | (441,680,041) | (3.69) |
| JUMLAH EKUITAS | 11,538,222,429 | 11,979,902,470 | (441,680,041) | (3.69) |
| JUMLAH EKUITAS | 11,538,222,429 | 11,979,902,470 | (441,680,041) | (3.69) |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | 11,554,466,198 | 11,994,447,677 | (439,981,479) | (3.67) |

Keterangan :

FINAL

Palembang, 13 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



YOYOK FIBRIANTO, SE.S.PI.M.PI

197402252002121001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN

SATUAN KERJA : (567481) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALEMBANG

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 11:07 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker

| KODE TRN | KODE AKUN | NAMA AKUN | DEBET | KREDIT |
|----------|-----------|---|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0.0 | 313111 | DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN | 0 | 7,475,647,698 |
| 0.0 | 313121 | DITERIMA DARI ENTITAS LAIN | 142,190,078 | 0 |
| 3.0 | 425122 | Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin | 0 | 3,551,000 |
| 3.0 | 425289 | Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya | 0 | 136,219,000 |
| 3.0 | 425332 | Pendapatan Jasa Karantina Perikanan | 0 | 2,420,000 |
| 3.0 | 425911 | Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 | 78 |
| 3.0 | 511111 | Belanja Gaji Pokok PNS | 1,432,467,300 | 0 |
| 3.0 | 511119 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 20,721 | 0 |
| 3.0 | 511121 | Belanja Tunj. Suami/Istri PNS | 106,325,270 | 0 |
| 3.0 | 511122 | Belanja Tunj. Anak PNS | 37,162,684 | 0 |
| 3.0 | 511123 | Belanja Tunj. Struktural PNS | 22,680,000 | 0 |
| 3.0 | 511124 | Belanja Tunj. Fungsional PNS | 82,530,000 | 0 |
| 3.0 | 511125 | Belanja Tunj. PPh PNS | 1,969,103 | 0 |
| 3.0 | 511126 | Belanja Tunj. Beras PNS | 93,783,900 | 0 |
| 3.0 | 511129 | Belanja Uang Makan PNS | 251,242,000 | 0 |
| 3.0 | 511151 | Belanja Tunjangan Umum PNS | 18,430,000 | 0 |
| 3.0 | 512211 | Belanja Uang Lembur | 215,717,500 | 0 |
| 3.0 | 512411 | Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) | 1,859,215,438 | 0 |
| 3.0 | 521111 | Belanja Keperluan Perkantoran | 799,497,253 | 0 |
| 3.0 | 521113 | Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh | 64,800,000 | 0 |
| 3.0 | 521114 | Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat | 3,599,000 | 0 |
| 3.0 | 521115 | Belanja Honor Operasional Satuan Kerja | 127,500,000 | 0 |
| 3.0 | 521119 | Belanja Barang Operasional Lainnya | 58,682,000 | 0 |
| 3.0 | 521211 | Belanja Bahan | 324,297,800 | 0 |
| 3.0 | 521213 | Belanja Honor Output Kegiatan | 8,160,000 | 0 |
| 3.0 | 521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya | 13,340,000 | 0 |
| 3.0 | 521252 | Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel | 1,500,000 | 0 |
| 3.0 | 521811 | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi | 123,115,007 | 0 |
| 3.0 | 521821 | Belanja Barang Persediaan bahan baku | 103,285,505 | 0 |
| 3.0 | 522111 | Belanja Langganan Listrik | 153,748,523 | 0 |
| 3.0 | 522112 | Belanja Langganan Telepon | 26,135,071 | 0 |
| 3.0 | 522113 | Belanja Langganan Air | 35,991,901 | 0 |
| 3.0 | 522141 | Belanja Sewa | 67,000,000 | 0 |
| 3.0 | 522151 | Belanja Jasa Profesi | 21,900,000 | 0 |
| 3.0 | 522191 | Belanja Jasa Lainnya | 147,795,000 | 0 |
| 3.0 | 523111 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 243,591,054 | 0 |
| 3.0 | 523121 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 315,359,954 | 0 |
| 3.0 | 524111 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 453,063,962 | 0 |

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN

SATUAN KERJA : (567481) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALEMBANG

Tgl Data : 13/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 11:07 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker

| KODE TRN | KODE AKUN | NAMA AKUN | DEBIT | KREDIT |
|----------|-----------|--|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.0 | 524113 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 75,800,000 | 0 |
| 3.0 | 524114 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 95,700,000 | 0 |
| 3.0 | 524119 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 79,782,922 | 0 |
| 3.0 | 532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 27,000,000 | 0 |
| 3.1 | 512211 | Pengembalian Belanja Uang Lembur | 0 | 916,300 |
| 3.1 | 512411 | Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) | 0 | 142,155 |
| 3.1 | 521111 | Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran | 0 | 96,000 |
| 3.1 | 521113 | Pengembalian Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh | 0 | 8,750,000 |
| 3.1 | 521115 | Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja | 0 | 444,500 |
| 3.1 | 521821 | Pengembalian Belanja Barang Persediaan bahan baku | 0 | 1,039,508 |
| 3.1 | 523111 | Pengembalian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 0 | 1,996,882 |
| 3.1 | 524111 | Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 0 | 996,353 |
| 3.1 | 524119 | Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 0 | 2,159,472 |
| JUMLAH | | | 7,634,378,946 | 7,634,378,946 |

Keterangan :

FINAL

Palembang, 13 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



YOYOK FIBRIANTO, SE.S.PI.M.PI

197402252002121001